

PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)
DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DAN HUKUM KESEHATAN

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh
RUDY WENARTA
NIM 10.93.0052

Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
Maret 2012


TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)
DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DAN HUKUM KESEHATAN

Diajukan oleh
RUDY WENARTA
NIM 10.93.0052

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama


Dr dr. Agus H. Rahim, Sp.OT-Spine, M.Epid, FICS, MH.Kes. Tanggal

Pembimbing Pendamping


Asmin Fransiska, SH, LLM.

Tanggal

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)
DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DAN HUKUM KESEHATAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

RUDY WENARTA

NIM 10.93.0052

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal.....

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji Lain

Dr dr. Agus H. Rahim, Sp.OT-Spine,
M.Epid, FICS, MH.Kes.

Prof. Dr. A. Widanti S., SH, CN

Pembimbing Pendamping


Asmin Fransiska, SH, LLM.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum
Tanggal 2012



Prof. DR. Agnes Widanti S., SH., CN.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih dan karunia-Nya, yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat menunaikan kewajiban akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata. Tulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”.

Untuk menghasilkan tulisan sederhana ini banyak bantuan dan bimbingan telah dikerahkan dan diterima. Untuk itu, terima kasih yang tulus ingin saya sampaikan.

Terima kasih kepada keluarga saya, terutama kedua orangtua saya, atas doa, kesabaran dan dukungannya akhirnya saya dapat menyelesaikan kuliah Magister Hukum Kesehatan.

Terima kasih kepada dosen yang telah membimbing saya selama ini, Dr. dr. Agus H. Rahim, SpOT-Spine, M.Epid, FICS, MH.Kes dan Asmin Fransiska, SH., MH selaku ko-pembimbing yang selama proses penyusunan telah meluangkan waktu, tenaga, serta kesabaran untuk mengarahkan saya.

Selain itu, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

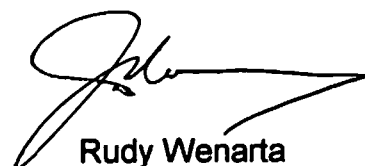
1. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSc, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, bapak Dr. Ir. A. Rudyanto Soesilo, MSA yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan.

3. Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, ibu Prof. Dr. Agnes Widanti S., SH, CN yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. dr. Tri Wahyu Murni, SpBTKV, MH.Kes, selaku Koordinator Kelas Paralel Jakarta dan juga Bapak Pamudji Rahardjo yang selalu membantu selama menempuh studi di Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Keluarga besar Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula di Maluku Utara.
6. Seluruh teman-teman Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Kelas Jakarta Angkatan VI.

Akhir kata, saya menyadari bahwa, oleh karena berbagai keterbatasan, tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi sebanyak mungkin pembaca.

Jakarta, Maret 2012

Penulis



Rudy Wenarta

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Lembar Pernyataan.....	ix
Abstrak.....	x
Abstract.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
E. KERANGKA PEMIKIRAN	11
F. METODE PENELITIAN	14
a. Metode Pendekatan	14
b. Spesifikasi Penelitian	15
c. Jenis Data	17
d. Metode Pengumpulan Data.....	18
e. Metode Analisis Data	18
G. PENYAJIAN THESIS	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ODHA DAN HAK ASASI MANUSIA	20
a. Perlindungan Hukum	20

1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Macam-macam Perlindungan Hukum	23
3. Dasar Perlindungan Hukum bagi ODHA.....	25
b. Hak Asasi Manusia (HAM)	29
1. Pengertian HAM	29
2. Sejarah HAM	33
B. ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)	38
a. Pengertian HIV dan AIDS	38
b. Cara Penularan pada HIV / AIDS	40
c. Manifestasi Klinis HIV/ AIDS	42
d. Implikasi HIV / AIDS	44
e. Upaya Penanggulangan	46
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ODHA DALAM	
MEMPEROLEH PELAYANAN ATAS HAK	
KESEHATAN	
A. LANDASAN DASAR HUKUM PELAYANAN ATAS HAK	
KESEHATAN.....	49
a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang	
Rumah Sakit	49
b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang	
Praktek Kedokteran	52
B. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ODHA.....	55
a. PERPRES Nomor 75 tahun 2006 tentang Pembentukan	
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional	55
b. Keputusan Menteri Kesehatan RI	
No.760/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan	
Lanjutan Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang Dengan	
HIV dan AIDS (ODHA)	60
c. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor	
1278/Menkes/SK/XII/2009 tentang Pedoman	

Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB dan HIV	62
d. Peraturan Daerah (Perda) Pada Propinsi Serta Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia	63
C. HAMBATAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ODHA.....	64
BAB IV PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP ODHA	
A. DASAR HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM)	70
B. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAM TERHADAP ODHA DI INDONESIA	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	82
B. SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

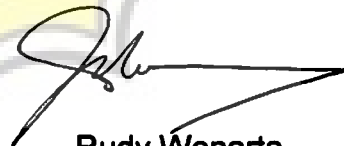
PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Rudy Wenarta, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 10.93.0052, menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Maret 2012



Rudy Wenarta

ABSTRAK

Perlindungan Hukum bagi ODHA dapat diartikan sebagai suatu jaminan yang diberikan oleh Negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan kepada ODHA. Perlindungan ODHA bila dikaitkan dengan HAM juga telah diberikan oleh pemerintah dalam bentuk landasan hukum Undang-Undang yang sudah ada sekarang ini. Tapi sampai sejauh mana manfaat, fungsi dan penerapan Undang-Undang tersebut bagi ODHA lah yang menjadi pertanyaan saat ini. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan HAM terhadap ODHA, terutama dalam hal memperoleh hak atas pelayanan kesehatan dan untuk mendapatkan gambaran mengenai kebijakan hukum di Indonesia terhadap ODHA dalam memperoleh pelayanan hak atas kesehatan.

Penelitian ini memakai metode pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, artinya metode penelitian yang mempelajari file yang ada, kemudian membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta dan sifat hubungan antar gejala yang diteliti sambil menganalisisnya. Selain itu, digunakan pula data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Perlindungan hukum ODHA ini belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, disebabkan belum ada Undang-Undang yang secara khusus yang menjamin hak ODHA terutama hak atas pelayanan kesehatan. Landasan Undang-Undang yang ada saat ini menjamin hak warga Negara Indonesia termasuk ODHA secara umum. Dan pada pelaksanaannya hanya formalitas semata karena tidak didukung tindakan lebih lanjut dari pemerintah. Pengawasan dan perlindungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk menunjukkan sikap serius pemerintah terhadap ODHA. Penerapan perlindungan dari Undang-Undang yang ada juga hanya merupakan sekedar wacana, disebabkan tidak adanya hasil yang nyata dari pemerintah, karena tidak tercapainya tujuan dari program yang sudah direncanakan. Bila dikaitkan dengan HAM juga, masih sering terjadi pelanggaran atas hak ODHA pada seluruh aspek kehidupannya, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun lingkungan sekitar mereka bekerja. Perlu adanya tindakan nyata dan perhatian yang lebih serius dari pemerintah untuk menjamin hak ODHA, terutama hak atas pelayanan kesehatan di kemudian hari.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Hak Asasi Manusia (HAM)

ABSTRACT

Legal protection for people living with HIV can be interpreted as a guarantee given by the State in the form of legislation to people living with HIV/AIDS "ODHA". Protection of human rights when applied to "ODHA" was also provided by the government in the form of a legal basis is the Law that it now is. But until the extent of the benefits, functions and application of the law for "ODHA" is that the current inquiry. Therefore this study aimed to gain insight about the human rights of "ODHA" view, especially in the case of the right to the health services and to gain insight about legal policy in Indonesia against "ODHA" in the acquisition of rights to health services.

This research method using Juridical Normative approach to the specification of descriptive analytical research, this means that the assessment method to learn the current file, then make a picture of orderly, factual and accurate statement of the facts and the nature of the relationship between symptoms that were examined as to analyze it. In addition, secondary data used were obtained from literature studies.

Legal protection of "ODHA" has not been fully implemented in Indonesia, because there is no law that specifically guarantees the rights of "ODHA", especially on the right health services. Legal foundation of existing guarantees the rights of Indonesian citizens, including "ODHA" in general. And the implementation is not supported merely because of formality further action from the government. Surveillance and protection of sustainable and ongoing needs to be done by government to demonstrate a serious attitude towards "ODHA". Application of the Legal protection of the others are only just discourse, due to the lack of tangible results from the government, because they are not achieving the goal of the program has been planned. When applied to human rights, still frequent violations against the rights of "ODHA" in all aspects of life, both in the field of health, education and the environment around them to work. Necessary to have a real action and more serious attention from the government to guarantee the rights of "ODHA", especially the rights of health services at a later date.

Keywords: Protection of the Law, People with HIV / AIDS (ODHA), Human Rights (HAM)